GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas **Tgl/Bln/Thn : 04 Desember 2007**

Subyek : Limbah **Hari : Selasa**

Halaman : 19

Limbah Belum Ditangani

Tidak Lebih dari 500 Industri Memiliki Sertifikat Manajemen Lingkungan

Jakarta, Kompas - Partisipasi industri, terutama skala usaha kecil dan menengah, untuk turut menjaga kelestarian lingkungan belum optimal. Lemahnya penegakan hukum menyebabkan penanganan limbah yang tergolong bahan berbahaya dan beracun industri tidak ditangani secara profesional.

Akibatnya, limbah cair bisa seenaknya dibuang ke sungai dan emisi gas buang dibiarkan mengotori udara. Ironisnya, audit sistem pengolahan limbah bukan menjadi kewajiban industri, tetapi masih bersifat sukarela.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi di Jakarta, Senin (3/12), mengungkapkan hal itu, terkait kewajiban dunia usaha menyikapi pemanasan global.

Sofjan mengatakan, analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) semestinya diterapkan terhadap industri besar maupun kecil. Saat ini industri pertambangan atau industri batik, misalnya, dibiarkan membuang limbah ke sungai.

"Kebijakan pemerintah harus lebih tegas. Ini bukan hanya menyangkut penegakan hukum, tetapi juga bagaimana industri menjaga tata lingkungan demi anak cucu kita," kata Sofjan.

Soal kampanye penggunaan batu bara sebagai bahan bakar industri, Sofjan menegaskan, investasi yang dibutuhkan untuk itu sangat besar. Ironisnya, pemerintah tidak memberikan insentif sedikit pun untuk membantu industri.

Direktur PT Panasia Indosyntec Suwadi Bing Andi selaku produsen tekstil mengatakan, bentuk kepedulian lingkungan atas penggunaan batu bara harus dibayar mahal. Selain investasi mesin penangkap emisi gas buang, pihaknya juga berinvestasi mesin electrostatic precipitator (ESP).

"Teknologi terbaru di Indonesia ini menggunakan sistem pendinginan emisi lewat proses alami sehingga uap yang terbuang di udara diurai menjadi titik-titik air yang bisa mendatangkan hujan," jelas Suwadi, tanpa bersedia menyebutkan nilai investasinya.

Bersifat sukarela

Senior Manajer Sertifikasi Lingkungan Sucofindo Trian Idul Fitri mengatakan, penerapan sistem manajemen lingkungan masih relatif kecil karena sifatnya sukarela. Proses sertifikasi membutuhkan biaya Rp 20 juta hingga Rp 35 juta, tergantung luas lahan dan jumlah karyawan.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Dari seluruh industri di Indonesia, kurang dari 500 industri yang memiliki sertifikat International Organization for Standardization (ISO) 14001 tahun 2004 tentang Persyaratan Sistem Manajemen Lingkungan.

"Masih banyak industri membuang limbah B3 ke sungai dan emisi beracun ke udara. Kementerian Negara Lingkungan Hidup harus menjadi ujung tombak penegakan hukum," kata Trian Idul Fitri. (OSA)

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP